

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI PARIGI
KELAS II**

TRIWULAN III

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	21
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	23
BAB IV	26
PENUTUP	26
4.1. Kesimpulan	26
4.2. Rekomendasi	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

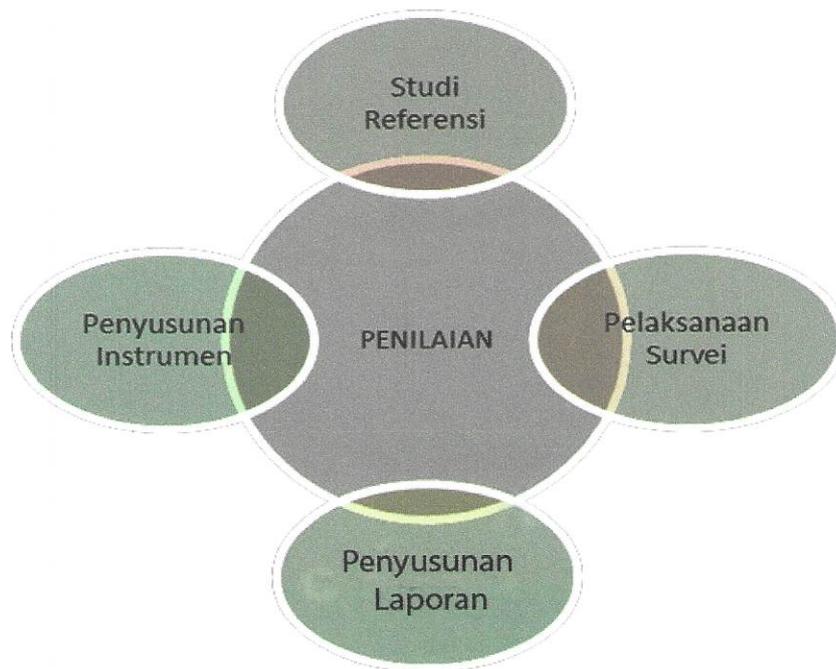
Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Parigi mayoritas memiliki latar SLTA.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	SD	0	0
2	SMP	1	3.33
3	SLTA	14	46.66
4	D1	0	0
5	D2	0	0
6	D3	1	3.33
7	S1	10	33,33
8	S2	4	13.33
9	Tidak Mencantumkan Pendidikan Terakhir	0	0 %
	Jumlah	30	100

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 26,66% responden pengguna layanan

Pengadilan Negeri Parigi memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

NO	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	6	20
2	TNI	0	0
3	POLRI	6	20
4	Swasta	8	26,66
5	Wirausaha	0	0
6	Tenaga Kontrak	1	3,33
7	Lainnya	9	30
8	Tidak Mencantumkan Pekerjaan	0	0
	Jumlah	30	100

3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, responden paling banyak berasal dari Sulawesi Tengah.

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pengadilan Negeri Parigi berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 21 tahun s/d 40 tahun. Bagi kelompok usia di atas 60 tahun, jumlah

responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun.

Tabel 7.
Usia responden

No.	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	6	20
2	29-39	19	63,33
3	40-49	4	13,33
4	50-59	1	3,33
5	60-69	0	0
Jumlah		30	100

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Parigi bersih dari Korupsi

Tabel 9.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Sesuai	4	27	90,00

2	Sesuai	3	3	10,00
3	Kurang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			30	100



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Parigi bersih dari Korupsi

Tabel 10.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	30	100
2	Petugas melayani	3	0	0

	jarang meminta imbalan			
3	Petugas melayani sering meminta imbalan	2	0	0
4	Petugas melayani selalu meminta imbalan	1	0	0
	Jumlah		30	100



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Parigi bersih dari Korupsi.

Tabel 11.
Indeks pada indikator menjual pengaruh

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak Pernah	4	27	90,00
2	Jarang/Pernah	3	1	3,33
3	Sering	2	1	3,33
4	Selalu	1	1	3,33
Jumlah			30	100



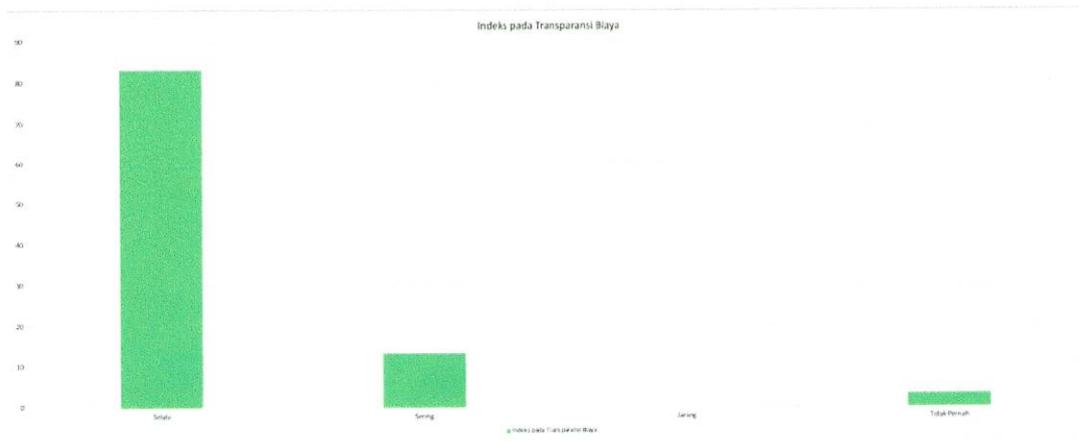
3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Parigi selalu melakukan transparansi biaya.

Tabel 12.
Indeks pada indikator Transaksi biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	4	25	83,33
2	Sering	3	4	13,33
3	Jarang	2	0	0
4	Tidak Pernah	1	1	3,33
Jumlah			30	100



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Parigi tidak pernah ada biaya tambahan.

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator biaya tambahan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak Pernah	4	27	90,00
2	Jarang/Pernah	3	2	6,66
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	1	3,33
Jumlah			30	100



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Parigi tidak pernah meminta hadiah.

Tabel 14.
Indeks pada indikator hadiah

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak Pernah	4	27	90,00
2	Jarang/Pernah	3	1	3,33
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	2	6,66
Jumlah			110	100

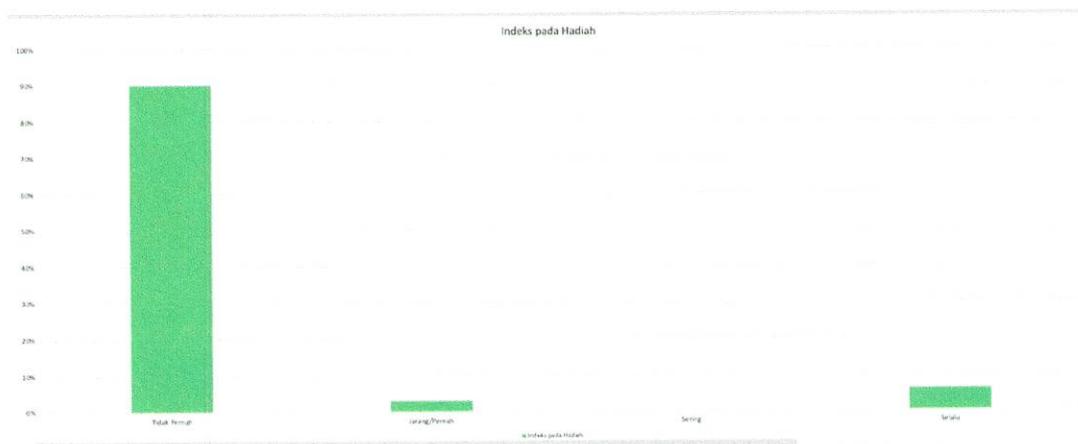


3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Parigi selalu memberikan transparansi biaya pada pelayanan.

Tabel 15.
Indeks pada Transparansi Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak Pernah	4	27	90,00
2	Jarang/Pernah	3	1	3,33
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	2	6,66
Jumlah			110	100



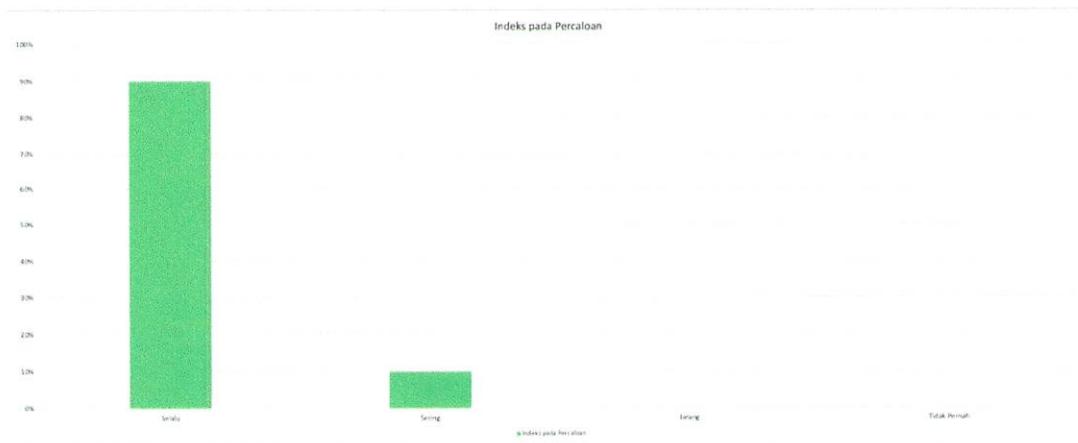
3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri tidak pernah ada Percaloan.

Tabel 16.
Indeks pada indikator percaloan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	4	27	90,00
2	Sering	3	3	10,00
3	Jarang	2	0	0
4	Tidak Pernah	1	0	0
Jumlah			30	100



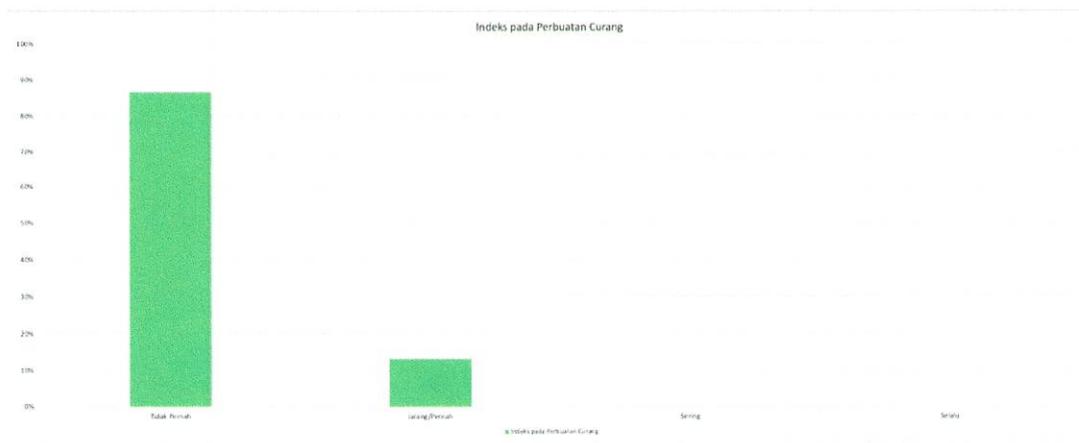
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari perbuatan curang.

Tabel 17.
Indeks pada indikator perbuatan curang

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak Pernah	4	26	86,66
2	Jarang/Pernah	3	4	13,33
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			30	100



3.2.10. Indikator Transaksi rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Parigi bersih dari transaksi rahasia.

Tabel 18.
Indeks pada indikator transaksi rahasia

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak Pernah	4	29	96,66
2	Jarang/Pernah	3	1	3,33
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			30	100



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Parigi sebesar 3,850.

Tabel 19.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri
Parigi

No.	UNSUR PELAYANAN	Nilai Rata-rata
U1	Manipulasi Peraturan	3,900
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000
U3	Menjual Pengaruh	3,800
U4	Transaksi Biaya	3,767
U5	Biaya Tambahan	3,767
U6	Hadiah	3,767
U7	Transparansi Biaya	3,767
U8	Percaloan	3,900
U9	Perbuatan Curang	3,867
U10	Transaksi Rahasia	3,967

Indeks 3,850 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 4

Tabel 20.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan
Negeri Parigi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih

				dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Parigi

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Kantor Pengadilan Negeri Parigi sekarang nampak berubah.. baik dari kebersihan dan performa pelayanan kepada masyarakat.. terima kasih
2	Pelayanan memuaskan
3	Pelayanan memuaskan
4	pelayanannya ramah dan cepat, khususnya di bagian PTSP HAKIMNYA JUGA SELALU BISA MEMBERIKAN SOLUSI UNTUK BERDAMAI
5	Kesan says do kantor pengadilan INI pegawainya sangat Ramah Dan sopan dalam memberikan informasi
6	Wow

7	Sangat baik
8	Dirgahayubma kn76
9	Sangat puas
10	Sangat baik
11	Sangat baik
12	Sangat memuaskan
13	Sangat puas
14	Pelayanan sangat bagus
15	PN Parigi semakin baik dalam pelayanan.. tingkatkan demi melayani
16	Pelayanan di pengadilan parigi sangt ramah,mudah dan cepat
17	Selalu meningkatkan layanan
18	Pelayanan memuaskan
19	Pelayanan memuaskan
20	Semoga parigi smakin bgus pelayanya terhadap masyarakat kecil
21	Pelayanan agar lebih ditingkatkan
22	Pelayanan memuaskan
23	Pelayanan sangat memuaskan
24	untuk petugas front office agar ditambah... biar pelayanan semakin cepat... walaupun sekarang sudah cepat.. Terima Kasih untuk
25	Tetap istiqama
26	bagus
27	Terimakasih at as pelayan yang diberikan oleh petugas pengadilan negeri parigi yang sangat memuaskan
28	Tetap maksimakan pelayanan terbaik untuk masyarakat

29	Pelayanan sangat bagus
30	Keran



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Juli 2021 sampai 30 September 2021

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,85 / 96,25%

Jumlah	30 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 23 PEREMPUAN : 7	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 SMP : 1 SMU : 14 Diploma 1 : 0	Diploma 3 : 1 S1 : 10 S2 : 4 S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 6 TNI : 0 POLRI : 6 LAINNYA : 9	SWASTA : 8 WIRUSAHA : 0 TENAGA KONTRAK : 1

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3,767
2. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? 3,767
3. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ? 3,767

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Memastikan bahwa tarif/biaya yang tercantum di website dan sk KPN diketahui oleh petugas dan masyarakat umum
2. Petugas layanan harus selalu menunjukkan tabel biaya resmi
3. Setiap Kali selesai pelayanan petugas harus menyatakan kami "kami tidak menerima tips / hadiah dalam bentuk apapun"

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Jakarta, 21 Oktober 2021
Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum

PRIM HARYADI

**INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI PARIGI
TAHUN 2021
TRIWULAN III**

NILAI IPK

3.85

Katagori : Sangat Baik

Nama Layanan : Pengadilan Negeri Parigi

Responden

Jumlah	:	30 Orang
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki = 23 Orang Perempuan = 7 Orang
Pendidikan	:	SD = 0 SMP = 1 SLTA = 14 D1 = 0 D2 = 0 D3 = 1 S1 = 10 S2 = 4

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR
TERUS MEMPERBAIKI DAN
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
1	Aan R-672980-IPAK-84B2A4D7B8	SULAWESI TENGAH	40 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	28 September 2021
2	Safrudin R-672980-IPAK-B6830FE0BE	SULAWESI TENGAH	56 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 September 2021
3	Roni R-672980-IPAK-DF88DAB1AA	SULAWESI SELATAN	32 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 September 2021
4	Ery Yhanto R-672980-IPAK-5CA4C365B7	SULAWESI TENGAH	30 Tahun Laki-laki	S1SWASTA	4	4	1	3	1	4	1	4	4	4	14 September 2021
5	Niluh Putu Rediasih R-672980-IPAK-D8BE370BF8	SULAWESI TENGAH	48 Tahun Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13 September 2021
6	Iman Bhaskoro R-672980-IPAK-A9B587F610	SULAWESI TENGAH	27 Tahun Laki-laki	SMUPNS	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	1 September 2021
7	Pendy R-672980-IPAK-6595AD24B3	SULAWESI TENGAH	29 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Agustus 2021
8	Yandi R-672980-IPAK-7F4EC34D90	SULAWESI TENGAH	31 Tahun Laki-laki	S1PNS	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	19 Agustus 2021
9	Budiarta R-672980-IPAK-A0D284D40B	SULAWESI TENGAH	31 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Agustus 2021
10	Roby R-672980-IPAK-F44BD2709C	SULAWESI TENGAH	33 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Agustus 2021
11	Anonim R-672980-IPAK-FFE794F2D1	SULAWESI TENGAH	31 Tahun Laki-laki	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Agustus 2021
12	Sulfia R-672980-IPAK-E451FCAF70	SULAWESI SELATAN	31 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 Agustus 2021
13	Purwati R-672980-IPAK-5F6ACB23E6	SULAWESI TENGAH	37 Tahun Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 Agustus 2021
14	I Nyoman Andrias R-672980-IPAK-149F3E3A02	SULAWESI TENGAH	26 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Agustus 2021
15	Vera R-672980-IPAK-02CE8CC31E	SULAWESI TENGAH	41 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	9 Agustus 2021
16	Dedi Sastrawan R-672980-IPAK-A84EAF1AB3	SULAWESI TENGAH	27 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	2	1	1	4	1	4	4	4	5 Agustus 2021
17	Sofyan R-672980-IPAK-078C774AC4	SULAWESI TENGAH	30 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	26 Juli 2021
18	Rosalina R-672980-IPAK-CE189F3830	SULAWESI TENGAH	32 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Juli 2021
19	Amin R-672980-IPAK-BC80B03ECA	SULAWESI TENGAH	38 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16 Juli 2021
20	Ikadek Sumiarta R-672980-IPAK-8CE19F4F8B	SULAWESI TENGAH	35 Tahun Laki-laki	SMPAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 Juli 2021
21	Anonim R-672980-IPAK-A681BD68AA	SULAWESI TENGAH	38 Tahun Perempuan	Diploma 3SWASTA	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	15 Juli 2021
22	Dandi R-672980-IPAK-ODA1B4A5CC	SULAWESI TENGAH	32 Tahun Laki-laki	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 Juli 2021
23	Herlina R-672980-IPAK-6A48B149E1	SULAWESI TENGAH	38 Tahun Perempuan	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 Juli 2021
24	ANto R-672980-IPAK-CD7D26CCC6	SULAWESI TENGAH	40 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	15 Juli 2021

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
25	Idris Mamonto R-672980- IPAK-4A155ACDE8	SULAWESI TENGAH	29 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 Juli 2021
26	Anonim R-672980- IPAK-48DBEF829D	SULAWESI TENGAH	21 Tahun Laki-laki	S1TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13 Juli 2021
27	I Nyoman Muliartawan R-672980-IPAK- E77FDAE09B	SULAWESI TENGAH	25 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Juli 2021
28	Hasbar R-672980- IPAK-08EAE97BEE	SULAWESI TENGAH	38 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	1	4	4	3	4	8 Juli 2021
29	I Nyoman Andrias R-672980-IPAK- FB9A3CD37C	SULAWESI TENGAH	27 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Juli 2021
30	Hartono R-672980- IPAK-149E5241C0	SULAWESI TENGAH	32 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Juli 2021



PENGADILAN NEGERI PARIGI

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI
NOMOR W21-U7/105/KP.04.6/07/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PADA PENGADILAN NEGERI PARIGI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu dan mendukung Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN pada Pengadilan Negeri Parigi;
 - b. bahwa komitmen tersebut tercantum dalam amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya Promosi dan Mutasi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi dan Panitera Muda Hukum maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Parigi tentang Penunjukan Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pada Pengadilan Negeri Parigi dipandang perlu untuk diubah;
 - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e diatas maka di anggap perlu mengubah Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Parigi tentang Penunjukan Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2021.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan d di atas untuk mengetahui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Parigi dipandang perlu untuk melakukan survey untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan membentuk Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Parigi;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Hasil Evaluasi ;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah agung RI Nomor KMA/080/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan.
 11. Keputusan Ketua Mahkamah agung RI Nomor KMA/096/SK/VII/2006 tentang tanggungjawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tanggal 8 April 2021 telah memberlakukan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya

MEMUTUSKAN :

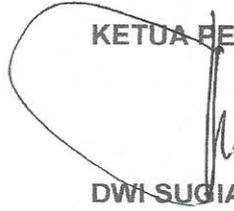
- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI TENTANG PENUNJUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PADA PENGADILAN NEGERI PARIGI.**
- KESATU :** Mencabut Sura Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor W21-U7/ 92 /KP.04.6/ 06 /2021 tanggal 16 Juni 2021;
- KEDUA :** Menunjuk yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Parigi;
- KETIGA :** Kepada yang ditunjuk sebagai Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Parigi dalam lampiran surat keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) secara periodik yaitu 3 (tiga) bulan sekali melalui Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER);
 - b. Membuat Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi;
- KEEMPAT :** Kepada Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Parigi dengan ruang lingkup survey sebagai berikut :
- a. Manipulasi Peraturan
 - b. Penyalahgunaan Jabatan
 - c. Menjual Pengaruh
 - d. Transparansi Biaya
 - e. Transaksi Rahasia
 - f. Biaya Tambahan
 - g. Hadiah
 - h. Transparansi Pembayaran
 - i. Percaloan
 - j. Perbuatan Curang

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Petikan penetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan / berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 08 Juli 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI



DWI SUCIANTO, SH.

Tembusan :

1. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Parigi;
2. Yth. Panitera Pengadilan Negeri Parigi di Parigi;
3. Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri parigi;
4. Arsip

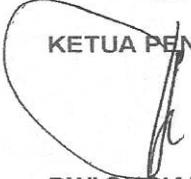
DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI
NOMOR : W.21-U7/ /KP.04.8/ 07 /2021
TANGGAL : 08 JULI 2021

**TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PADA PENGADILAN NEGERI PARIGI**

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	YAKOBUS MANU, S.H.	WAKIL KETUA	PENGARAH
2	IIN FATIMAH, S.H.	HAKIM	KETUA
3	M. TASLIM THAHIR, S.H.	PANMUD HUKUM	ANGGOTA / KOORDINATOR SURVEYOR
4	RAHMAWANTI, S.E.	PTSP HUKUM	ANGGOTA / SURVEYOR
5	FEMILA SARI, A.Md.	PTSP PIDANA	ANGGOTA / SURVEYOR
6	M. RIFALDI YUDISTIRA	PTSP PERDATA	ANGGOTA / SURVEYOR
7	SITI HARTINA, S.Pd.	PTSP UMUM	ANGGOTA / SURVEYOR
8	RIYA WAHYUNINGTYAS, S.H.	KASUBBAG PTIP	SEKRETARIAT
9	VISUDDHATMA SANKARA, S.KOM	PRANATA KOMPUTER	SEKRETARIAT
10	BHELI ISYA K. KOLOAY, S.T.	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	SEKRETARIAT

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 08 Juli 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI


DWI SUGIANTO, SH.